I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas utama aparatur adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Jelas digariskan dalam UUD 1945 alenia keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Desa merupakan sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh.

Aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, dan salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan

tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Peranan mereka demikian penting dan menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Maka diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dilingkungan suatu masyarakat harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan dalam lingkungan satuan desa harus melibatkan upaya seorang kepala desa

untuk mempengaruhi perilaku para perangkat desa dalam suatu situasi. Kepala desa dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala desa bukan saja harus memiliki wibawa tetapi harus memiliki kesanggupan untuk menggunakan wibawanya terhadap para perangkat supaya diperoleh atau memunculkan kinerja perangkat yang baik. Azas-azas yang perlu ditetapkan dalam sebuah lembaga, adalah pembagian tugas. Indikator yang harus diperhatikan dalam azas pembagian tugas ini adalah kemampuan dari individu-individu yang disertai tugas. Maka dalam suatu lembaga perlu adanya manajemen efektif yang mampu mengarahkan dan membina perilaku lembaga dan administrasi.

Pemikiran tersebut di atas, dikaitkan dengan kondisi riil sementara aparat Pekon Sukaraja dan Pekon Banjaragung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan aparat Pekon Sukaraja dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Dilihat dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan.

Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana tersebut diatas, maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat

desa sebagai penyelenggara yang belum optimal. Konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut akan terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik, bahwa dalam Implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Antara lain masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa. Pada tahun 2008 Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, telah melaksanakan Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, kajian ini telah menghasilkan cetak biru (*blueprint*) yang memuat strategi penyelesaian masalah (*problem solving*) penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun modul-modul peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Modul-modul tersebut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu perencanaan dan penganggaran desa, keuangan desa, penyusunan kebijakan desa, kepemimpinan kepala desa dan manajemen pelayanan desa.

Berdasarkan Prariset 14 Maret 2013 (Kamis, Jam 10.30 Wib), yang dilakukan penulis di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan wawancara yang dilakukan terhadap Seketaris Pekon yang bernama Amirdan, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan

tugas perangkat pekon dan kurangnya kordinasi antara prangkat pekon, selain itu kualitas tingkat pendidikan serta pengetahuan tentang tugas-tugas perangkat pekon tidak memadai sehingga menjadi permasalahan internal dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Pekon Sukaraja.

Permasalahan lain yang menjadi penyebab menurunnya semangat kerja prangkat pekon dalam pelaksanaan tugasnya yaitu masalah kesejahteraan, tidak tersedianya *reward* yang sesuai menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya motivasi kerja prangkat pekon. Kurangnya kordinasi antara Kepala Pekon dan prangkat pekon menyebabkan kurangnya pengetahuan perangkat pekon dalam pelaksanaan tugasnya, masalah lain adalah dalam pelaksanaan tugas berdasarkan perintah yang diberikan kepala pekon tidak dilaksanakan secepatnya sehingga pelayanan pada masyarakat tidak terlaksana secara cepat.

Perangkat pekon dan kepala pekon merupakan basis pelayanan masyarakat terendah tinggi rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan bukan hanya tergantung pada kinerja para perangkat pekon saja selaku bawahan tetapi juga pemimpinnya, kepemimpinan seseorang akan menentukan maju atau mundurnya, hidup atau mati organisasi yang dipimpinnya.

Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai karakteristik kepemimpinan yang efektif, mempunyai suatu karakter kepemimpinan tertentu, sebagai pencerminan dari kepribadian yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan yang muncul dari dalam diri sendiri menunjukkan efektif atau tidaknya kepemimpinannya.

Mengingat pentingnya kepemimpinan sebagai faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi dan usaha. Pemerintahan desa seperti halnya pemerintah pusat dan daerah, dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal bagi warga dan mampu menjawab tuntutan yang makin tinggi dari masyarakat, baik dari kualitas maupun dari segi kuantitasnya.

Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, tetapi penelitian ini akan lebih fokus pada efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat pekon dalam melaksanakan tugas pemerintahan maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan kinerja perangkat pekon dipimpin oleh Kepala Pekon.

Berdasarkan Pra-riset yang penulis lakukan pada tanggal 14 Maret 2013 (Kamis, Jam 10.30 WIB), dan peninjauan awal yang dilakukan di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan wawancara terhadap Sekretaris Pekon yang bernama Bapak Amirdan, fenomena kepemimpinan kepala pekon di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsi Kepala Pekon sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas perangkat pekon kurang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, salah satu contoh adalah tidak tersedianya alat-alat untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pekon seperti komputer misalnya. Untuk mempermudah saat pencarian data diperlukan arsip-arsip agar data-data yang ada tidak hilang dan terlupakan.

2. Hasil kerja perangkat pekon tidak mendapatkan imbalan yang memuaskan yang menjadikan semangat kerja perangkat ekon dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat menjadi menurun.
3. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip belum dilaksanakan secara maksimal. Contohnya yaitu minimnya pemasukan, keuangan pekon.
4. Tingkat pengetahuan perangkat pekon tentang pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan Pekon

Penulis mengambil penelitian di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dengan pertimbangan bahwa kinerja Kepala Pekon dipekon sukaraja dalam peningkatan motivasi kerja terhadap bawahanmya belum begitu maksimal, dari data yang diperoleh penulis ketika prariset tanggal 14 maret 2013 dalam bidang pembangunan tersedia cukup dana untuk membangun infrastruktur pekon, akan tetapi itu tidak terlaksana dengan maksimal disebabkan lemahnya koordinasi antara individu-individu perangkat pekon sehingga Seketeris Pekon terkesan bekerja sendiri. Pada tahun 2010 terdapat anggaran belanja Pekon sebesar Rp33.000.000,00 dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangun fisik sebesar 66%, sedangkan untuk nonfisik dialokasikan sebesar 36%. Implementasi penggunaan dana anggaran tersebut tidak terealisasi dengan baik itu disebabkan kurang ada kesepakatan antara perangkat, masyarakat, dan kepala pekon.

Bila dibuat perbandingan antara Pekon Sukaraja dan pekon Kedaloman, Banjaragung, Banjar Negri, Dan Gisting atas/bawah. Pekon Sukaraja termasuk

pekon tertua karena sejak pecah dari pekon kedaloman pada tahun 1917 dan sekarang jumlah penduduk Pekon Sukaraja berjumlah 1856 jiwa, Aktivitas pemerintahan berjalan dengan baik namun tidak begitu menghasilkan perubahan-perubahan drastis terhadap pekon, Dibandingkan dengan Kecamatan Gisting Bawah dan Gisting Atas yang jumlah penduduk mencapai 15.000 jiwa perkembangan dalam sektor fisik (infrastruktur) sangat berbanding jauh lebih maju, Maju atau berkembangnya suatu daerah (pekon) bukan hanya terletak pada jumlah penduduk, potensi, kerja perangkat pekon, bagian paling vital adalah peran seorang pemimpin untuk menggali segala potensi yang ada di dalam pekon. Pekon merupakan basis pemerintah terendah yang paling dekat dengan masyarakat, keaktifan seorang kepala pekon dalam mengontrol kerja bawahannya serta karakternya sebagai salah satu keturunan kerajaan yang mempengaruhi efektivitas kerja menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis.

Penelitian terdahulu oleh Fachri Azhar (2009) berjudul *Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja Karyawan Dalam Organisasi Perusahaan* (Kasus PT Indofarma Tbk. Cikarang, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh manajer adalah gaya kepemimpinan konsultatif dan gaya-gaya kepemimpinan direktif, partisipatif, dan delegatif juga diterapkan dalam hal-hal dan situasi tertentu. Tingkat motivasi kerja karyawan tergolong tinggi, yang dilihat bersedianya karyawan untuk bekerja keras, bekerjasama dan bertanggungjawab. Bekerja keras terlihat dari kemauan dari karyawan dalam menerima lemburan dalam bekerja.

Penelitian lain oleh Marben Sinaga (2011) yang berjudul *Hubungan Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Kabupaten Samosir*. Hasil penelitiannya menunjukkan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru, nilai korelasi sebesar 0.468 dan besar thitung > ttabel ($4.614 > 1.99$). Motivasi kerja dengan kinerja guru, nilai korelasi sebesar 0.654 dan besar thitung > ttabel ($7.541 > 1.99$), (3) efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan kinerja guru, besar korelasi Rhitung yakni 0.738 dan besar Fhitung > Ftabel ($44.898 > 3.12$), maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan berarti antara efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan kinerja guru dapat diterima dan diuji kebenarannya.

Berdasarkan hal diatas, peneliti mengambil judul “Hubungan Efektivitas Kepemimpinan Kepala Pekon Sukaraja dan Pekon Banjaragung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Perangkat Pekon”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Seberapa erat hubungan efektivitas kepemimpinan kepala pekon terhadap peningkatan motivasi kerja perangkat pekon di Pekon Sukaraja dan Pekon Banjaragung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keeratan hubungan efektivitas kepemimpinan kepala pekon terhadap peningkatan motivasi kerja perangkat Pekon Sukaraja dan Pekon Banjaragung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana yang telah penulis rumuskan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam memotivasi bawahannya untuk bekerja lebih baik lagi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintahan Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, Khususnya berkaitan dengan kepemimpinan kepala pekon dalam hal meningkatkan motivasi kerja perangkat pekon.